



Dewan Klungkung Minta Bupati Tindaklanjuti Catatan BPK

■ Setelah Berhasil Raih WTP Tahun Anggaran 2016

ANGGOTA DPRD Klungkung bersama dengan eksekutif menggelar rapat paripurna di Kantor DPRD Klungkung, Senin (10/7). Rapat kerja tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru, dan dihadiri oleh Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta.

Dalam paripurna tersebut, DPRD Klungkung memberikan rekomendasi kepada Bupati Suwirta untuk menindaklanjuti hal-hal yang masih menjadi catatan BPK, pasca Klungkung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2016.

Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru mengatakan, keberhasilan Pemkab Klungkung meraih opini WTP merupakan hal yang patut diapresiasi. Hal tersebut menandakan jika pengelolaan pemerintah telah mampu berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Namun, opini WTP tersebut masih disertai beberapa catatan. Sehingga, pihak legislatif tetap memberikan rekomendasi kepada eksekutif untuk segera menindaklanjuti catatan tersebut.

Adapun rekomendasi dari legislatif kepada pemerintah tersebut antara lain, Pemkab Klungkung berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tindak



lanjut BPK atas laporan keuangan kepada BPK dan DPRD Klungkung. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan kepada bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Pemkab pun dipandang perlu mendorong BPK untuk memutakhirkan data status temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang tercantum dalam situs BPK.

"Kami sangat mengapresiasi pemerintah karena telah meraih WTP selama dua kali berturut-turut. Namun kami tetap memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menindaklanjuti sejumlah catatan. Sehingga, jalannya pemerintahan kedepannya lebih mantap lagi, kami berharap rekomendasi ini bisa mengurangi catatan dari BPK," jelas I Wayan

Baru ketika diwawancara sesuai rapat paripurna.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menjelaskan, sesuai hasil pemeriksaan, BPK memberikan 6 catatan atas laporan keuangan Pemkab tahun anggaran 2016. Menurutnya jumlah itu turun signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 22 catatan. "Temuan BPK itu sudah dibahas dan sudah bisa diterima. Tetapi catatan itu tidak mengurangi tingkat kewajaran dari pelaporan," terangnya.

Meski demikian, Suwirta mengaku sangat sepakat dan menerima rekomendasi dewan tersebut, karena sifatnya yang sangat membangun. Ia pun berharap kedepannya opini WTP Pemkab Klungkung mampu diraih tanpa catatan. "Saya sepakat terhadap rekomendasi agar kedepan bisa dituntaskan. Bila perlu kedepannya WTP itu tanpa catatan," terangnya. (adv/mit)

Edisi : Selasa, 11 Juli 2017

Hal : 4



Bendesa Candi Kuning Tersangka Dugaan Korupsi BKK

TABANAN, TRIBUN BALI - Bendesa Adat Desa Pakraman Candi Kuning, I Made Susila Putra, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Khusus Kabupaten (BKK). Ia disinyalir bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran BKK dari Provinsi Bali tahun 2015 senilai Rp 200 juta.

"Sudah dilakukan sebelum Hari Raya Lebaran 2017. MSP (Made Susila Saputra) sudah kami tetapkan tersangka. Kini proses masih berjalan," ungkap Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, Rio Irnanda, Senin (10/7).

Dua alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti dokumen berupa laporan pertanggungjawaban sudah cukup untuk menjerat Susila menjadi tersangka. Jumlah saksi yang telah diperiksa dalam kasus itu sebanyak 20 orang dan kemungkinan akan bertambah. Selain itu, untuk penetapan tersangka bisa bertambah tergantung hasil pengembangan kasus.

"Dalam gelar perkara dan ekspose kasus sudah menguatkan. Makanya ditetapkan. Belum kami tunjuk JPU dan tersangka belum ditahan, masih dalam pelengkapan berkas," katanya.

Kejari Tabanan meminta penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk penentuan berapa jumlah kerugian Negara. "Meskipun jaksa berwenang untuk melakukan audit, BPKP juga dilibatkan,"

Sudah dilakukan sebelum Hari Raya Lebaran 2017. MSP (Made Susila Saputra) sudah kami tetapkan tersangka.

Rio Irnanda

Kasi Intel Kejari Tabanan

ujar Rio.

Tahun 2014 lalu, Desa Pakraman Candikuning mengajukan proposal BKK ke Provinsi Bali. Dana proposal itu digunakan kegiatan upacara *ngenteg linggih* dan *pasraman* kilat anak-anak. Dalam laporan pertanggungjawaban proposal ditulis Rp 156 juta untuk biaya *ngenteg linggih*, Rp 20 juta untuk *pasraman* kilat anak-anak, Rp 21 juta, biaya operasional *prajuru* Desa Pakraman Candikuning dan biaya penunjang administrasi Rp 3 juta.

Dana cair pada November 2015. Upacara *ngenteg linggih* di Desa Pakraman Candiku-

ning digelar September 2015. Acara *pasraman* kilat anak-anak dilaksanakan antara bulan Juni-Juli 2015. Jaksa mengungkapkan, bendahara *ngenteg linggih* tidak ada mencatat dana BKK yang masuk. Begitupun untuk *pasraman* kilat anak-anak yang ternyata adalah agenda rutin sekolah setempat.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tabanan Ida Bagus Alit Ambara Pidada beberapa waktu lalu menyebutkan, dari tersangka mengklaim menalangi dana kegiatan tersebut.

Sementara itu, Bendesa Adat Desa Pakraman Candi Kuning, I Made Susila Putra belum bisa dihubungi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Begitu juga dengan pesan singkat *Triun Bali* yang belum direspon. (arg)

Edisi : Selasa, 11 Juli 2017

Hal : 4